

# STRATEGI *WORLD UYGHUR CONGRESS* (WUC) DALAM MENYUARAKAN KASUS ETNIS UYGHUR DI XINJIANG TAHUN 2014 - 2019

Ni Wayan Sri Upayoni<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, D.A Wiwik Dharmiasih<sup>3)</sup>  
<sup>123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: sriupayoni@gmail.com<sup>1)</sup>, ratihkumaladewi@unud.ac.id<sup>2)</sup>, wiwikd@unud.ac.id<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to explain WUC's strategy in voicing Uyghurs'rights. The method used in this research is a qualitative method. The background in this study are Chinese policies that discriminate against Uyghurs. Chinese government created the policy as government considered Uyghurs as a separatist group. The act of discrimination has gradually become a violation of human rights which has prompted WUC to voice this case in international forums. The Researcher use the boomerang pattern concept and tactical typology as a framework. The level of analysis used by the researcher is international system. This research then found the answer that the WUC had succeeded in building alliances with other countries and other international organizations to exert pressure on China. This success is a form of the boomerang pattern strategy and is supported by four typologies of tactics adopted by WUC.*

*Keywords: WUC, Uyghurs, Xinjiang, Boomerang Pattern.*

## 1. PENDAHULUAN

Semenjak munculnya kajian-kajian transnasionalisme dalam Ilmu HI setelah Perang Dunia II, aktor-aktor non-negara menunjukkan eksistensinya dalam hubungan internasional (Aulia, et. al., 2019). Adanya system transnasionalisme membuka peluang aktor-aktor non-negara untuk berkolaborasi dan menangani isu lintas batas negara, salah satunya dengan membentuk jaringan yang disebut *Transnational Advocacy Network* (TAN) (Parameswari, 2016). Salah satu aktor yang menjadi pemeran utama di dalam TAN yaitu *Non-Government Organization* (NGO) atau organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah dapat memperluas ruang geraknya dalam melakukan agenda advokasi terkait suatu

isu bila bergabung dalam jaringan advokasi transnasional. Isu-isu yang dimaksud meliputi lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan, kesehatan dan lainnya. Salah satu organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi secara transnasional yaitu *World Uyghur Congress* (WUC).

*World Uyghur Congress* (WUC) merupakan organisasi non-pemerintah yang merepresentasikan kepentingan bersama Etnis Uyghur di seluruh dunia (*World Uyghur Congress*, n.d.). Sebagai organisasi yang mewakili Etnis Uyghur, WUC berperan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Terbentuknya WUC dilatarbelakangi oleh keadaan Etnis Uyghur di Xinjiang yang mengalami pelanggaran HAM.

Etnis Uyghur memiliki latar belakang yang berbeda dengan etnis asli Tiongkok yaitu Etnis Han. Perbedaan tersebut teridentifikasi dengan jelas melalui perbedaan bahasa keseharian yang digunakan, Etnis Uyghur menggunakan Bahasa Turki sedangkan Etnis Han menggunakan Bahasa Mandarin. Perbedaan ini diakibatkan oleh migrasi Etnis Han menuju Xinjiang, yang dahulu disebut Republik Turkistan Timur (Amalia, 2018). Sejak Xinjiang menjadi bagian dari Tiongkok, Etnis Uyghur berkeinginan dan berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya seperti bangsa lain yang berhasil mendirikan negara-negara yang merdeka (Bovingdon, 2010). Keinginan Etnis Uyghur tersebut dianggap sebagai gerakan separatis oleh Pemerintah Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok kemudian menerapkan kebijakan dalam ranah sosial-budaya hingga ekonomi yang bertujuan untuk mencegah perpecahan wilayahnya tersebut (BBC, 2018). Pemerintah Tiongkok yang menganut system politik komunis dalam mempertahankan kedaulatan negaranya sulit menerima heterogenitas atau keberagaman. Hal itu menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok cenderung berorientasi monokultural, sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi dan mempersempit ruang kebebasan Etnis Uyghur di Xinjiang (Karisma, 2017). Adapun tindakan-tindakan diskriminasi yang dialami oleh Etnis Uyghur seperti adanya kesenjangan hak sosial dan

ekonomi dengan Etnis Han, pembatasan hak-hak dalam beragama, hingga mengalami tindakan kriminalitas.

Tindakan-tindakan kriminalitas dan diskriminasi terhadap Etnis Uyghur yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok tersebut menuai kecaman dari beberapa aktor internasional seperti organisasi non-pemerintah dan para aktivis HAM internasional. Kecaman terhadap Pemerintah Tiongkok juga berasal dari diaspora Etnis Uyghur. WUC sebagai organisasi transnasional juga berupaya mencari solusi atas kasus pelanggaran HAM yang dialami Etnis Uyghur di Xinjiang. WUC berupaya membantu menyelesaikan isu Etnis Uyghur secara demokratis tanpa kekerasan. Namun, Pemerintah Tiongkok tidak merespon upaya tersebut dengan baik.

Pemerintah Tiongkok justru melakukan propaganda terhadap WUC dengan menyebutnya sebagai kelompok separatis dan teroris. Propaganda tersebut dilakukan untuk mencegah simpati dari dunia internasional terkait isu Etnis Uyghur (Hidayat, 2013). Propaganda yang ditujukan pada WUC, menjadi satu hambatan bagi WUC untuk mencapai tujuannya. Oleh karenanya, Peneliti kemudian mempertanyakan bagaimana strategi World Uyghur Congress (WUC) dalam menyuarakan kasus diskriminasi Etnis Uyghur di Xinjiang tahun 2014 - 2018.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, Penulis kemudian ingin mempertanyakan bagaimana strategi World Uyghur Congress

(WUC) dalam menyuarkan kasus diskriminasi etnis Uyghur di Xinjiang tahun 2014 - 2019.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua literature dalam tulisan ini. Literatur pertama yang Peneliti gunakan adalah tulisan dari Syarifatul Ula (2017) dengan judul "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar." Tulisan Ula (2017) membahas mengenai peran organisasi non-pemerintah dalam menangani isu kemanusiaan. Ula (2017) menganalisis peran organisasi non-pemerintah yaitu *Human Rights Watch* dalam menangani isu kemanusiaan di Myanmar dengan menggunakan konsep TAN. Ula (2017) menjelaskan *Human Rights Watch* sebagai actor dalam TAN dan memaparkan peran organisasi non-pemerintah tersebut dengan menggunakan empat tipologi taktik TAN.

Ula (2017) membantu Peneliti mengetahui posisi organisasi non-pemerintah dalam sebuah jaringan advokasi seperti TAN. Selain itu, Ula (2017) juga memaparkan upaya advokasi yang dilakukan organisasi non-pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh kelompok etnis tertentu. Melalui tulisan Ula (2017), Peneliti dapat melihat dua hal penting yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir penelitian ini. Pertama, Peneliti dapat memahami definisi organisasi non-pemerintah dan keberadaannya dalam

TAN. Kedua, Peneliti dapat memahami penerapan empat tipologi taktik yang dapat digunakan untuk menganalisis upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Meski demikian, tulisan dari Ula (2017) tersebut belum dapat melengkapi kerangka berpikir dari penelitian ini, sehingga Peneliti memerlukan tulisan lain yang mampu memaparkan mengenai strategi organisasi non-pemerintah dalam menyuarkan pelanggaran HAM.

Tulisan kedua yang Peneliti gunakan yaitu tulisan dari Roihanatul Maziyah (2020) dengan judul "*Seafood not Slavefood*: Advokasi Aktivisme Transnasional untuk Mengakhiri Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand." Maziyah (2020) memaparkan mengenai upaya advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yaitu *Environmental Justice Foundation* (EJF) dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja perikanan di Thailand. Pada penelitiannya, Maziyah (2020) memaparkan peran organisasi non-pemerintah dalam memengaruhi sikap pemerintah negara dan strategi *Boomerang Pattern* yang digunakan dalam melakukan advokasi. Maziyah (2020) mengungkapkan bahwa strategi *Boomerang Pattern* dapat memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan empat tipologi taktik TAN.

Maziyah (2020) membantu Peneliti mengetahui strategi yang digunakan organisasi non-pemerintah untuk

melakukan advokasi terkait suatu isu pelanggaran HAM. Organisasi non-pemerintah dapat menggunakan strategi *Boomerang Pattern* dengan menerapkan empat tipologi taktik dalam melakukan advokasi terkait isu pelanggaran HAM tersebut. Pada tulisannya, Maziyah (2020) menggunakan empat tipologi taktik untuk menganalisis upaya advokasi yang dilakukan oleh EJF. Melalui tulisan Maziyah (2020), Peneliti dapat melihat strategi Boomerang Pattern dan empat tipologi taktiknya yang dapat digunakan dalam menjalankan advokasi untuk memengaruhi pemerintah negara dan menerapkannya sebagai kerangka berpikir pada penelitian ini.

### **Kerangka Pemikiran**

Peneliti menggunakan Strategi *Boomerang Pattern* untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. *Boomerang Pattern* berisikan strategi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dan jaringannya dalam melakukan advokasi agar sesuai dengan tujuannya.

Keck & Sikkink mengkonsepkan strategi *Boomerang Pattern* sebagai strategi dalam *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dimotori oleh aktor non-negara. Hal tersebut dikonsepsikan melalui pemikiran transnasionalisme yang dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme dalam Hubungan Internasional (Keck & Sikkink, 1998). Keck & Sikkink (1998; Soetjipto, et. al., 2018) beranggapan bahwa

norma, identitas dan kepentingan dalam sistem internasional adalah suatu yang konstruktif dan rekonstruktif, mereka bisa saja mengalami pergeseran, salah satunya dapat dilakukan maupun dialami oleh suatu negara. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, aktor non negara dapat menunjukkan eksistensinya sebagai *norm promotor agent* dalam politik transnasional. Soetjipto (2018) menegaskan bahwa aktor non negara dapat memainkan peran penting dalam politik transnasional dengan melakukan berbagai hal yang relevan sesuai dengan situasi terkini seiring dengan perkembangan globalisasi, diantaranya melakukan kampanye dan menegakkan norma-norma universal tertentu seperti HAM, lingkungan, gender, dan sebagainya.

Aktor-aktor non-negara salah satunya yaitu organisasi non-pemerintah seringkali melakukan aktivitas tersebut melintasi batas-batas negara, sebab mereka merupakan aktor yang independen dan tidak diikat oleh kedaulatan suatu negara. Edwards (2010) menyebutkan bahwa organisasi non-pemerintah merupakan organisasi independen, *non-profit*, berorientasi pada tujuan bersama, dan tidak didirikan maupun dikontrol oleh pemerintah. Sifatnya yang independen menjadi sebuah keistimewaan bagi aktor non-negara khususnya organisasi non pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas transnasional. Diantaranya yaitu melakukan advokasi transnasional hingga membentuk *Transnational Advocacy Network* (TAN)

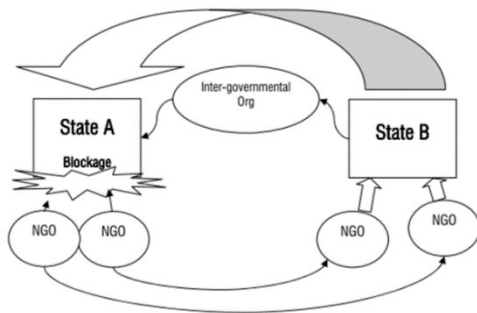
bersama dengan aktor-aktor non-negara lainnya maupun pemerintah negara.

Keck & Sikkink (1999) mengkaji TAN sebagai sebuah bentuk organisasi yang dicirikan dengan pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar (horizontal). Jaringan advokasi tersebut terorganisir untuk mempromosikan suatu isu, ide-ide, dan norma-norma untuk mengadvokasi perubahan kebijakan. Aktor-aktor utama yang tergabung dalam TAN saling bekerja sama mendukung dan melakukan advokasi terkait suatu isu. Salah satu aktor utama yang tergabung dalam TAN yaitu organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah bersama aktor TAN lainnya berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk menyampaikan suara mereka di dalam politik internasional. Agar advokasinya berhasil serta mencapai tujuannya, maka organisasi non-pemerintah memerlukan strategi.

Maziyah (2020) menggunakan pendekatan dari Keck & Sikkink mengatakan bahwa ketika suatu negara membatasi gerakan organisasi non-pemerintah yang menuntut perubahan maka organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama hingga membentuk jaringan berupa jaringan advokasi dan menyusun strategi untuk menekan pemerintah negara tersebut. Melalui jaringan advokasi tersebut, organisasi non-pemerintah dapat mengumpulkan kekuatan bersama aktor-aktor lainnya sehingga dapat menyerang balik negara target. Strategi serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Boomerang Pattern.

Keck & Sikkink (1999) mengonsepsikan Boomerang Pattern sebagai pola interaksi NGO dengan aktor-aktor TAN untuk menekan pemerintah suatu negara. Strategi Boomerang Pattern dijalankan ketika pemerintah suatu negara menghambat maupun membatasi pergerakan organisasi non-pemerintah untuk masuk ke arena politik domestik suatu negara dan melakukan advokasi terkait suatu permasalahan yang terjadi. Organisasi non-pemerintah tersebut kemudian mencari dukungan dari aktor-aktor lainnya seperti pemerintah negara lain, IGO, sesama organisasi non-pemerintah, dan media, hingga melakukan kerja sama. Melalui kerja sama dan dukungan dari aktor-aktor tersebut, tekanan terhadap pemerintah negara yang menjadi target menjadi bertambah. Tekanan yang dihasilkan dari pola hubungan dan interaksi aktor-aktor tersebut menjadi kekuatan dari organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi untuk menuntut dan mendapatkan perhatian dari pemerintah negara yang ditargetkan. Peneliti menggambarkan cara kerja Strategi Boomerang Pattern melalui Gambar 1.

Gambar 1.1 Cara Kerja Strategi Boomerang Pattern



Sumber: Keck &Sikkink (1999)

Keberhasilan strategi Boomerang Pattern dalam melakukan advokasi tergantung pada penerapan empat tipologi taktik, seperti yang dikutip dari Keck dan Sikkink (1999; Maziyah, 2020). Keck &Sikkink (1999) menyatakan bahwa para aktor TAN termasuk organisasi non-pemerintah biasanya melakukan strategi maupun upaya-upaya advokasi dengan menggunakan tipologi taktik. Jadi organisasi non-pemerintah dapat melakukan strategi Boomerang Pattern dengan menggunakan tipologi taktik untuk mencapai tujuannya. Terdapat empat tipologi taktik yang digunakan NGO, yaitu:

1. *Information politics* yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan mengarahkan informasi yang digunakan secara politik dengan cepat dan kredibel sehingga akan memiliki dampak yang besar.
2. *Symbolic politics* yaitu kemampuan untuk menyerukan simbol-simbol, aksi-aksi, dan cerita mengenai situasi tertentu sehingga dapat dipahami oleh publik.
3. *Leverage politics* yaitu kemampuan untuk menarik simpati aktor-aktor yang

lebih kuat agar dapat memengaruhi situasi tertentu ketika salah satu anggota dari suatu jaringan tidak memiliki peluang untuk memberikan pengaruhnya.

4. *Accountability politics* yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan aktor-aktor yang lebih kuat agar tetap memegang kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan Strategi *Boomerang Pattern* dan empat tipologi taktik dari Keck &Sikkink (1999) dalam menganalisis strategi yang digunakan WUC dalam melakukan advokasi terkait kasus kemanusiaan Etnis Uyghur. Konsep ini juga memaparkan cara kerja strategi yang dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah ketika mendapatkan hambatan dari negara target advokasi.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang menjadi objek penelitian melalui angka-angka maupun gambaran verbal (Punaji, 2010). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi untuk mengetahui apa yang dialami oleh subjek penelitian melalui perilaku, motivasi, tindakan dan persepsi dalam bentuk kata-kata atau deskripsi (Moleong, 2005, h.6).Melalui penelitian deskriptif kualitatif, Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana

strategi World Uyghur Congress (WUC) dalam menyuarakan kasus diskriminasi Etnis Uyghur di Xinjiang tahun 2014-2018.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Etnis Uyghur di Xinjiang

Pasca berakhirnya Perang Dingin, Xinjiang menjadi pintu bagi Tiongkok untuk mengakses negara-negara Asia Tengah. Wilayah Xinjiang berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Mongolia, Rusia, Pakistan, dan India (CNN, 2020). Bagi Tiongkok yang berambisi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia, termasuk Asia Tengah, letak geografis Xinjiang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Etnis Uyghur, etnis mayoritas yang menempati provinsi tersebut pasca Perang Dingin, dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Tiongkok. Berdasarkan sejarahnya yang berulang kali berupaya memisahkan diri dari Tiongkok, etnis tersebut dilabeli sebagai 'kelompok separatis Xinjiang' (BBC, 2014). Oleh karenanya, Etnis Uyghur mengalami perlakuan yang ketat dari pemerintah Tiongkok guna menumpas cikal-bakal separatisme yang dapat berdampak pada lepasnya Xinjiang dari Tiongkok.

Guna mempertahankan Xinjiang sebagai bagian dari Tiongkok, Pemerintah Tiongkok menerapkan berbagai kebijakan di Xinjiang. Kebijakan tersebut diawali dengan migrasi Etnis Han menuju Xinjiang, yang mana Pemerintah Tiongkok menawarkan lapangan pekerjaan dan

keringanan pajak bagi Etnis Han (The Diplomat, 2017). Perpindahan tersebut membuahkan hasil berupa peningkatan jumlah Etnis Han di Provinsi Xinjiang serta menggeser keberadaan Etnis Uyghur di Xinjiang. Pasca migrasi tersebut, Etnis Han menguasai berbagai sektor di Xinjiang khususnya sector ekonomi. Sebab Pemerintah Tiongkok dan perusahaan-perusahaan di Xinjiang menetapkan aturan-aturan yang cenderung mengutamakan Etnis Han (Zang, 2016; Wahyuni, 2019). Akibatnya kondisi Etnis Uyghur di Xinjiang semakin terhimpit, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatannya pun rendah, hingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan berada di garis kemiskinan.

Setelah penetapan kebijakan tersebut, Pemerintah Tiongkok kembali menetapkan kebijakan-kebijakan lain yang mendiskriminasi Etnis Uyghur. Salah satu kebijakan tersebut adalah Revolusi Budaya yang bertujuan untuk membatasi kebudayaan dan kegiatan beribadah (Hidayat, 2013: 169). Pembatasan kebudayaan dan kegiatan beribadah tersebut tidak hanya diterapkan pada kampanye Revolusi Budaya saja, melainkan diterapkan lebih lanjut pada kebijakan *strike hard* yang dikeluarkan pada tahun 1996. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Tiongkok menganut monokulturalisme.

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berdampak pada Etnis Uyghur dengan budaya dan agama yang berbeda dari masyarakat asli Tiongkok yaitu Etnis

Han, sehingga menyebabkan Etnis Uyghur terdiskriminasi. Diskriminasi-diskriminasi yang dialami Etnis Uyghur di Xinjiang tentunya menimbulkan kecemburuan antar etnis di Xinjiang hingga terjadi aksi-aksi unjuk rasa dan perlawanan (Karisma, 2017, p.46). Seperti yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2009, Etnis Uyghur melakukan perlawanan hingga menimbulkan kerusuhan antar Etnis yaitu Etnis Uyghur dengan Etnis Han (BBC, 2018). Tragedi ini dianggap sebagai sebuah gerakan separatisme, sehingga Pemerintah Tiongkok semakin memperketat pengawasannya pada masyarakat Etnis Uyghur.

Pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan-kebijakan dan sanksi-sanksi hukum untuk mengendalikan kegiatan keagamaan dan aktivitas Etnis Uyghur lainnya. Etnis Uyghur diawasi oleh pasukan militer Pemerintah Tiongkok dengan berbagai kamera yang terpasang di setiap sudut provinsi Xinjiang, dipantau melalui komputer dan aktivitas sponselnya (Human Rights Watch, 2020). Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga semakin memperketat pengawasannya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan Etnis Uyghur, diantaranya Etnis Uyghur dilarang mengajarkan agama Islam bagianak-anak, dilarang menggunakan nama-nama Muslim, dilarang menggunakan produk-produk halal selain makanan, dan para pejabat Uyghur juga dilarang beribadah ke Masjid, serta melaksanakan ibadah puasa (BBC, 2018).

Meskipun Pemerintah Tiongkok telah memperketat kebijakan-kebijakannya, hingga tahun 2014 masih terjadi kerusuhan dan aksi terror kepada Pemerintah Tiongkok yang melibatkan Etnis Uyghur di Xinjiang. Akibat dari kerusuhan-kerusuhan tersebut, Pemerintah Tiongkok memperbaharui kebijakan *Strike Hard* dengan melakukan karantina masal bagi orang-orang maupun kelompok-kelompok yang dianggap sebagai teroris di kamp-kamp yang berada di wilayah Xinjiang (BBC, 2018). Pemerintah Tiongkok menjalankan kebijakan *Strike Hard* dengan dalih re-edukasi.

Walaupun demikian, media memercayai bahwa kamp-kamp tersebut bertujuan untuk memberikan doktrin kepada Etnis Uyghur menggunakan cara yang brutal dan melibatkan kekerasan (Berji, 2019). Pemerintah Tiongkok mengklaim pada karantina tersebut Etnis Uyghur menerima pendidikan Bahasa Mandarin, Konsep Hukum Tiongkok, dan pelatihan kejuruan (BBC, 2018). Namun menurut kesaksian masyarakat Uyghur yang berhasil kabur dari kamp, selama di tahan di kamp masyarakat Etnis Uyghur mengalami siksaan fisik dan psikologis. Hal tersebut semakin memperburuk keadaan Etnis Uyghur di Tiongkok. Kondisi-kondisi Etnis Uyghur tersebut kemudian mencuri perhatian masyarakat internasional diantaranya diaspora Etnis Uyghur yang tergabung dalam organisasi *World Uyghur Congress* (WUC).



## **WORLD UYGHUR CONGRESS**

World Uyghur Congress (WUC) merupakan organisasi internasional yang merepresentasikan kepentingan bersama Etnis Uyghur di Xinjiang dan di seluruh dunia. Berdasarkan Bovingdon (2010), WUC merupakan hasil dari pecahan East Turkestan National Center (ETNC) yang semula didirikan di Tiongkok. WUC terlibat dalam perdebatan dengan Pemerintah Tiongkok akibat Kecenderungan Pemerintah Tiongkok untuk mempertahankan kebijakan monokulturalnya (Waisbich, 2014). Hal tersebut sekaligus sebagai upaya Pemerintah Tiongkok untuk mencegah terbentuknya gerakan-gerakan nasionalis Uyghur.

Hal tersebut mengakibatkan WUC gagal memperjuangkan Uyghur. Tiongkok bahkan berhasil menggiring masyarakatnya untuk menolak keberadaan WUC. Hal ini memberikan tekanan kepada WUC hingga mengakibatkan pembubaran NGO tersebut. Namun, pada 16 April 2004, WUC berhasil bangkit dan terbentuk kembali di Jerman (Bovingdon, 2010). Kembalinya WUC tidak lantas memudahkan perjalanan NGO tersebut dalam memperjuangkan HAM Etnis Uyghur

Ketika terjadi kerusuhan di Urumqi antara Etnis Han dengan Etnis Uyghur pada tahun 2009, media berita Tiongkok, Xinhua dan *Chinese Central Television* (2009), menyatakan bahwa Rebiya Kadeer, pemimpin WUC, merupakan dalang dari kerusuhan tersebut. Akan tetapi, Rebiya Kadeer telah menyangkal pernyataan

tersebut (UNPO, 2009). Walaupun Rebiya Kadeer telah memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut, masyarakat Tiongkok tetap menganggap bahwa WUC merupakan organisasi teroris dan separatis dengan tujuan memisahkan Xinjiang dari Tiongkok (CCTV, 2009). Hal ini semakin mempersulit WUC untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Tiongkok.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh WUC adalah besarnya pengaruh perekonomian Tiongkok dalam forum internasional. Meskipun Etnis Uyghur, yang mayoritas merupakan penduduk Muslim, mengalami pembatasan-pembatasan hak dalam melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan yang dianutnya, negara-negara Islam justru bungkam dalam isu ini. Dikutip melalui VOA (2019), pengaruh bantuan dan kerjasama perekonomian Tiongkok dengan Pakistan, Arab Saudi, serta negara-negara di benua Afrika mengakibatkan terbentuknya blok yang tidak mengancam, bahkan mendukung tindakan Tiongkok di Xinjiang. Bahkan, Arab Saudi dan Pakistan menyuarakan pujian mereka kepada Tiongkok atas keberhasilan dan keefektifan penumpasan aksi terorisme di Xinjiang, serta prestasi penegakan HAM di Tiongkok (Maizland, 2020). Hal ini menimbulkan permasalahan bagi WUC yang memiliki kepentingan untuk mengangkatisu HAM di Xinjiang kedalam forum internasional.

WUC sulit untuk menekan kembali pemerintah Tiongkok terkait isu Etnis Uyghur. Sulitnya memperoleh dukungan internasional akibat pengaruh

perekonomian Tiongkok membuat WUC harus menjalin kerja sama dengan aktor-aktor lain guna memperoleh dukungan. Hal ini disebabkan, WUC tidak dapat berjuang sendiri untuk menekan Tiongkok. Keberadaannya sebagai NGO kemanusiaan, membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional (baik NGO maupun organisasi pemerintahan) yang memiliki kepedulian terhadap HAM.

Selain memperoleh dukungan dari negara dan organisasi internasional, WUC juga harus mencanangkan strategi untuk memperoleh dukungan masing-masing individu dari masyarakat internasional. Keterlibatan media dalam menyebarkan informasi akan sangat dibutuhkan. Hal ini karena WUC terkendala dalam memperoleh dukungan dari masyarakat Tiongkok. Oleh karena itu, dukungan yang berasal dari masyarakat internasional diharapkan dapat membantu WUC untuk memperjuangkan isu HAM Etnis Uyghur. Guna mengatasi berbagai hambatan, WUC membutuhkan strategi yang tepat dalam menekan Pemerintah Tiongkok.

## **STRATEGI WORLD UYGHUR CONGRESS**

### ***Boomerang Pattern.***

Selaras dengan pernyataan Keck & Sikkink (1998), ketika suatu negara, dalam hal ini, Tiongkok, membatasi pergerakan organisasi non-pemerintah yang menuntut perubahan, yaitu ETNC, maka organisasi non-pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan aktor lainnya. Adapun

aktor yang terlibat dalam kerja sama dengan organisasi non-pemerintah tersebut adalah Jerman hingga terbentuk WUC. Terlibatnya Jerman dalam pembentukan WUC merupakan tahap awal dari strategi boomerang pattern yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk memperjuangkan Etnis Uyghur di Xinjiang.

Setelah bermula di Munich, Jerman, WUC melanjutkan strategi *boomerang pattern* dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara, di antaranya negara-negara Barat, Asia Tengah, hingga mengadakan konferensi WUC bersama Parlemen Jepang (Radio Free Asia, 2012). Selain itu WUC juga telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, seperti UNHRC dan UNESCO untuk menyuarakan isu Etnis Uyghur, khususnya yang berada di Xinjiang (Global Times, 2020). Upaya-upaya tersebut tentunya merupakan bagian dari strategi WUC untuk mencari dukungan dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang dialami Etnis Uyghur.

WUC yang aktif dalam mengadakan pertemuan hingga kunjungan-kunjungan ke berbagai negara merupakan bentuk dari upaya WUC dalam membangun TAN. Sesuai dengan pernyataan Keck & Sikkink (1998), bahwa kerja sama yang tengah diadakan oleh WUC merupakan bentuk dari pembangunan jaringan TAN. TAN memiliki ciri-ciri berupa pola komunikasi yang bersifat sukarela, timbal balik, dan sejajar. Hal ini tercermin dalam konferensi WUC bersama parlemen Jepang

dan partisipasi WUC di forum-forum internasional, yang mana terjadi komunikasi secara suka rela mengenai keberadaan Etnis Uyghur di Xinjiang (Radio Free Asia, 2012; Global Times, 2020).

WUC juga berperan dalam mengumpulkan informasi mengenai Etnis Uyghur di Xinjiang dan memublikasikannya kepada khalayak umum. Pada publikasi tersebut, dimuat situasi-situasi yang dialami Etnis Uyghur, meliputi pembunuhan ilegal, penahanan yang sewenang-wenang oleh Pemerintah Tiongkok, pengenaan sanksi hukuman mati, kampanye *strike hard*, pengadilan dan hukuman terhadap Ilham Tohti atas tuduhan separatisme. Laporan tersebut juga memuat status para pengungsi maupun pencari suaka Uyghur, diskriminasi agama, bahasa, dan budaya, kebebasan mobilitas di Xinjiang dan Tiongkok, transparansi dan akuntabilitas hukum Tiongkok, dan akuntabilitas aparat keamanan Tiongkok atas pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Etnis Uyghur (World Uyghur Congress, 2015).

Observasi dan investigasi WUC dalam pembuatan laporan tersebut juga melibatkan kerja sama dengan beberapa media internasional. Adapun media yang terlibat ialah Radio Free Asia, The Reuters, The New York Times, dan BBC (Global Times, 2020; Uyghur Congress, n.d). Selain itu, WUC juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang mengusung HAM seperti *Human Rights Watch* (HRW), *Amnesty International* (AI), dan *Unrepresented Nations People*

*Organization* (UNPO) dalam mengumpulkan dan memublikasikan informasi-informasi tersebut dalam bentuk berita.

Selain itu, selama periode tahun 2014-2018 WUC telah mengadakan konferensi sebanyak enam kali. Konferensi tersebut bernama Dewan Umum WUC yang secara garis besar membahas mengenai situasi terkait pelanggaran HAM dan diskriminasi yang dialami Etnis Uyghur. Pada kegiatan tersebut WUC tidak hanya melibatkan organisasi non-pemerintah saja, bahkan beberapa kali WUC bekerja sama dengan badan HAM Uni Eropa dalam melaksanakan kegiatannya tersebut (Turkistan Time, 2017). Jadi, melalui konferensi-konferensi tersebut, WUC bertujuan untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang dialami Etnis Uyghur di Xinjiang.

Hal ini merupakan bagian dari strategi yang ditempuh oleh WUC. Organisasi non-pemerintah tersebut bertujuan untuk mencari dukungan dari organisasi-organisasi internasional dan partisipan lainnya diantaranya media-media internasional agar turut serta menyuarakan kasus Etnis Uyghur dalam lingkup yang lebih luas. Dukungan yang diperoleh dapat berupa tekanan oleh organisasi-organisasi tersebut untuk Tiongkok. Selaras dengan tujuan strategi *boomerang pattern*, yaitu untuk balas menekan negara target menggunakan dukungan yang diperoleh dari pihak luar, yakni negara lain serta organisasi internasional.

WUC juga menyuarakan kasus Etnis Uyghur melalui demonstrasi damai yang sering kali dilakukan. Sejak tahun 2014 hingga 2018, WUC melakukan demonstrasi damai bersama dengan beberapa organisasi non-pemerintah yang mengusung HAM secara masal di beberapa kota dan negara-negara di dunia. Pada tahun 2017 WUC juga melakukan aksi demonstrasi bersama *European Parliaments* di Belgia (UNPO, 2018). Kemudian, pada tahun 2018 WUC bersama *Uyghur Women* telah melakukan demonstrasi besar secara massal di lima belas kota di tiga belas negara. Sebagian besar demonstrasi yang dilakukan WUC bertujuan untuk menyuarakan kasus Etnis Uyghur agar mendapat perhatian dari masyarakat internasional dan aktor-aktor internasional serta sebagai upaya untuk memprotes, menuntut, dan menekan Pemerintah Tiongkok melalui opini-opini publik yang dibentuk dari aksi tersebut. Oleh karenanya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh WUC merupakan strategi yang krusial untuk menarik perhatian dunia pada kasus Uyghur yang berlangsung di Tiongkok. Dengan tujuan, perhatian yang diperoleh akan member tekanan bagi pemerintah Tiongkok yang tidak hanya berasal dari organisasi internasional, namun kini melibatkan masing-masing individu dalam masyarakat internasional.

Segala upaya kampanye maupun negosiasi yang telah dilakukan oleh WUC secara perlahan menunjukkan keberhasilannya dalam menyuarakan kasus Etnis Uyghur. Media internasional

dan NGO HAM lainnya ikut serta memberitakan dan mempublikasikan artikel dan hasil investigasi WUC terkait situasi Etnis Uyghur, khususnya pelanggaran HAM yang dialaminya. Adanya pemberitaan dari beberapa media internasional dan artikel yang dirilis oleh beberapa NGO HAM seperti HRW dan AI kemudian mendorong negara-negara Barat menunjukkan dukungannya dalam menyuarakan kasus Etnis Uyghur bersama WUC. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2018 UNHRC, CEDAW, dan CERD menanggapi laporan yang dikirimkan oleh WUC dan membuat pernyataan hasil tinjauannya di Tiongkok. Hingga kemudian PBB mengumumkan secara resmi hasil peninjauan tersebut dan memaparkan situasi Etnis Uyghur di Xinjiang (Reuters, 2018). Sejak saat itu, media-media internasional mulai ramai memberitakan situasi Etnis Uyghur di Xinjiang dan mencuri perhatian masyarakat internasional.

Sepanjang periode tahun 2014-2019 tersebut WUC telah menjalankan strategi *boomerang pattern*-nya yang berdasarkan pada empat tipologi taktik. Mulai dari *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics* untuk meyakinkan aktor-aktor internasional tersebut dan aktor lainnya agar mendukung advokasi WUC. Hingga menjalankan *accountability politics* untuk menuntut dan mendesak Pemerintah Tiongkok. Empat tipologi taktik tersebutlah yang akan menjelaskan lebih rinci bagaimana *boomerang pattern* dapat dijalankan oleh

WUC. Tipologi taktik ini berperan sebagai bagian krusial dari strategi WUC dalam menyuarkan kasus Etnis Uyghur di Xinjiang.

### **Tipologi taktik.**

Taktik pertama yang dilakukan WUC yaitu *information politics* meliputi pengumpulan dan identifikasi informasi, serta penyebaran informasi terkait situasi Etnis Uyghur. WUC mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Diantaranya dari media-media internasional dan NGO HAM seperti HRW dan AI. Selain itu, WUC juga mengumpulkan informasi dari aktivis, pengacara, serta pejabat dan pemerintah negara. Namun, sebelum informasi tersebut dimuat dalam laporan dan disebarluaskan, tentunya WUC kembali mengidentifikasi informasi tersebut. Selanjutnya, WUC mempublikasikan laporan tersebut pada situs web WUC dan disebarluaskan kepada media-media internasional (World Uyghur Congress, n.d). Melalui langkah-langkah tersebut, telah dipaparkan dengan jelas mengenai beragamnya sumber informasi yang dimiliki oleh WUC guna mendapatkan data yang akurat terkait Uyghur.

Menurut Keck & Sikkink (1998), agar mendapat perhatian dari media internasional, sebuah kelompok advokasi perlu memiliki hubungan baik dengan jurnalis yang bersimpati akan kasus yang diadvokasikan, memiliki reputasi yang dapat dipercaya jurnalis, dan memiliki kemampuan untuk mengemas informasi

secara tepat waktu dan dramatis. WUC dalam hal ini telah memenuhi ketiga syarat tersebut, yang mana WUC telah menjalin kerja sama dengan beberapa media internasional yang bergerak dalam bidang HAM, bahkan tidak jarang melibatkan jurnalis yang merupakan keturunan Uyghur. Lalu, WUC juga telah menjalin kerja sama dengan media-media terpercaya, seperti Human Rights Watch untuk meyakinkan masyarakat bahwa informasi yang disajikan berasal dari sumber yang kredibel. Hal tersebut tentunya memudahkan WUC untuk menyebarkan informasi, fakta, dan dokumentasi terkait kasus-kasus Etnis Uyghur kepada masyarakat internasional.

Taktik kedua yang dapat dilakukan WUC dalam menyuarkan kasus Etnis Uyghur yaitu dengan *symbolic politics*. Pada taktik ini WUC berupaya menyuarkan kasus Etnis Uyghur dengan menggunakan simbol dan cerita, serta melakukan aksi-aksi yang dapat menarik perhatian. Pertama, trik label diterapkan WUC bertujuan untuk memermalukan Pemerintah Tiongkok agar mematuhi norma HAM dan menghentikan pelanggaran HAM yang telah dilakukan. WUC menyebutkan dalam artikel serta laporannya bahwa Pemerintah Tiongkok merupakan pelaku *human rights violations in East Turkestan* (World Uyghur Congress, n.d).

Trik kedua yang dilakukan WUC dalam menjalankan taktik *symbolic politics* yaitu pembingkaihan isu. Trik ini masih memiliki keterkaitan dengan trik label, yang mana WUC mengekspos dan menceritakan

fakta-fakta terkait *silenced crimes* yang dilakukan pemerintah Tiongkok dan *human rights violations in East Turkestan* (World Uyghur Congress, n.d). Publikasi cerita-cerita kekejaman Pemerintah Tiongkok dan pelanggaran HAM yang dialami Etnis Uyghur dapat memancing reaksi dari masyarakat maupun aktor-aktor internasional. Trik ini bertujuan untuk menyentuh sisi emosional masyarakat umum guna berempati dengan Etnis Uyghur.

Selain menggunakan kedua trik tersebut dalam menceritakan situasi Etnis Uyghur, WUC juga menyertakan simbol-simbol dan karikatur dalam melakukan aksi-aksi demonstrasinya. WUC menggunakan gambar yang memiliki arti bahwa masyarakat Etnis Uyghur di Tiongkok telah dibungkam, seperti yang dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 2. Karikatur *Symbolic Politics*.



sumber: [twitter.com/free\\_uighur](https://twitter.com/free_uighur)

Taktik ketiga, *leverage politics*, yaitu kemampuan untuk menarik simpati aktor-aktor yang lebih kuat agar dapat memengaruhi situasi tertentu ketika salah

satu anggota dari suatu jaringan tidak memiliki peluang untuk memberikan pengaruhnya (Keck & Sikkink, 1998). Dengan taktik ini, WUC berupaya mendesak pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh dan kemampuan dalam menyuarakan kasus Etnis Uyghur dan menekan Pemerintah Tiongkok agar menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan.

Adapun pihak-pihak tersebut meliputi negara-negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, organisasi internasional yaitu PBB dan Uni Eropa, organisasi non-pemerintah seperti UNPO, Uyghur Human Rights Project (UHRP), AI, HRW, organisasi-organisasi HAM, dan organisasi Uyghur lainnya. Media-media internasional juga tidak luput dari pihak yang membantu WUC dalam meningkatkan pengaruhnya, seperti Radio Free Asia, The Reuters, dan BBC. Kerja sama WUC bersama pihak atau aktor-aktor tersebut tentunya diharapkan dapat membawa pengaruh pada upaya WUC meyarakan kasus Etnis Uyghur sehingga dapat memberi tekanan pada Pemerintah Tiongkok. Adapun pengaruh yang dapat diberikan oleh aktor-aktor tersebut yaitu dari segi material dan moral (Keck & Sikkink, 1999).

Pada kasus ini, WUC berupaya memberikan pengaruh moral dan material dalam menjalankan taktik *leverage politics*. Upaya WUC guna memberikan pengaruh material dapat dilihat melalui dialog-dialog yang ditujukan kepada Parlemen Eropa (Radio Free Asia, 2019). WUC meminta

agar Parlemen Eropa bertindak tegas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok pada Etnis Uyghur. Selain itu, WUC juga menekankan pengaruh moral melalui partisipasinya dalam forum-forum internasional.

Sepanjang tahun 2014 sampai 2019, WUC menjalankan taktik ini dengan mengadakan dan mengikuti konferensi-konferensi internasional. Tiap tahunnya, WUC mengadakan konferensi internasional bersama dengan beberapa organisasi non-pemerintah lainnya dan terkadang bekerja sama dengan organisasi serta badan internasional. Pada periode tahun 2014-2019 WUC telah mengadakan konferensi-konferensi internasional yang berkaitan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas di Tiongkok, penggunaan bahasa ibu di tengah situasi yang dihadapi Etnis Uyghur di Xinjiang, kebijakan anti minoritas khususnya yang menindas kebebasan beragama, serta ketidakamanan dan ketegangan politik yang dihadapi Etnis Uyghur di Xinjiang, dan para pengungsi Uyghur ilegal yang mendatangi beberapa negara (World Uyghur Congress, n.d). Partisipasi aktif WUC pada forum-forum internasional membawa dampak positif pada upaya advokasinya. Berbagai pernyataan resmi dan resolusi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya advokasi WUC menambah *power* WUC untuk memperlakukan dan menekan Pemerintah Tiongkok agar dapat mengubah perilaku dan kebijakannya. Upaya ini selanjutnya menjadi bagian pada taktik *accountability politics*.

Pada taktik terakhir, WUC berupaya untuk mendesak Pemerintah Tiongkok agar meratifikasi perjanjian HAM internasional dan menghentikan segala tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap Etnis Uyghur (World Uyghur Congress, 2014). Namun pada taktik ini WUC tidak dapat secara langsung mendesak Pemerintah Tiongkok, sebab WUC sudah memiliki reputasi yang tidak baik di mata Pemerintah Tiongkok. Maka dalam menjalankan taktik ini, WUC memerlukan bantuan dari organisasi internasional yang memiliki power lebih besar. Oleh karenanya, pernyataan resmi dari PBB terkait situasi Etnis Uyghur di Xinjiang menjadi senjata bagi WUC untuk dapat mendesak dan menekan Pemerintah Tiongkok. Tidak hanya itu, resolusi Parlemen Eropa tahun 2019 juga menjadi senjata baru bagi WUC untuk menekan Pemerintah Tiongkok.

Berbagai upaya tersebut telah dilakukan WUC dalam menjalankan taktik *accountability politics* agar dapat mendesak dan menekan Pemerintah Tiongkok. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum mencapai hasilnya. Kendala yang dihadapi oleh WUC dalam menekan Tiongkok ialah pengaruh yang dimiliki oleh Tiongkok di kancah internasional. Bahkan, dalam rapat UNHRC, negara-negara terbagi menjadi dua blok dan mayoritas berhasil dibungkam oleh Tiongkok agar tidak menyuarakan protes terkait Etnis Uyghur di Xinjiang (VOA, 2019).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan kondisi Etnis Uyghur di Xinjiang dan advokasi WUC dari tahun 2014 hingga 2019 tersebut, WUC telah melakukan berbagai upaya dalam menyuarkan kasus Etnis Uyghur di Xinjiang. WUC telah menggunakan strategi *boomerang pattern* dalam menyuarkan kasus Etnis Uyghur. Pada pelaksanaan strategi tersebut, WUC tidak bekerja secara independen, melainkan melibatkan aktor-aktor internasional.

Adapun empat tipologi yang digunakan oleh WUC ialah: 1) *Information politics*, yaitu WUC mengumpulkan informasi mengenai keadaan Etnis Uyghur di Xinjiang dari berbagai sumber untuk diolah dan dipublikasikan; 2) *Symbolic politics*, yaitu tindakan WUC dalam membingkai isu melalui penyertaan simbol-simbol guna menarik simpati masyarakat internasional atas Etnis Uyghur; 3) *Leverage politics*, WUC menjalankan taktik ini melalui dialog dalam forum-forum dan konferensi internasional untuk menarik simpati aktor-aktor internasional; 4) *Accountability politics*, WUC menjalankan taktik ini melalui demonstrasi damai bersama organisasi non-pemerintah dan aliansinya, serta menuliskan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Tiongkok untuk mendesak Pemerintah Tiongkok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmed, Shamima, & David Potter. (2006). *NGOs in International Politics*. United States of America: Kumarian Press, Inc.
- Bovingdon, Gardner. (2010). *The Stranger in Their Own Land*. New York: Columbia University Press.
- Kamberi, D. (2015). *Uyghurs and Uyghur Identity*. Washington D.C : Radio Free Asia.
- Keck, M., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*. Oxford: Blackwell.
- Kelleher, D., McLaren, K., and Bisson, R. (1996). *Grabbing the Tiger by the Tail: NGOs Learning for Organizational Change*. Ottawa: Canadian Council for International Cooperation
- Lewis, David. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations : An Introduction*. London: Routledge
- Mingst, K. A. (1947). *Essentials of International Relations*. New York: W. W. Norton & Company. Inc.
- Moleong, J. Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Setyosari, Punaji. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Soetjipto, Ani, et.al. (2018). *Transnasionalisme : Peran Aktor Non*



*Negara dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tregoe, B. B., & Zimmerman, J. W. (1980). *Top Management Strategy : What Is and How To Make It Work*. New York: Simon and Schuster.

## JURNAL

Aulia, J., Isnaeni, N., & Yudono, R. M. (2019). Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Hubungan Internasional*. XII (1). 97-114. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4MvOro3qAhWCYysKHaxmDD8QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.unair.ac.id%2FJHI%2Farticle%2Fdownload%2F8978%2F8071&usg=AOvVaw3RseAiyRK2chX9qymp5Vbn>

Edwards, G. E. (2010). *Assessing The Effectiveness of Human Rights Non-Governmental Organizations (NGOs) From The Birth Of The United*

*Nations To The 21st Century: Ten Attributes Of Highly Successful Human Rights NGOs*. *Michigan State Journal of International Law*. 18(2). 165-228. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi81fm6rY3qAhVHfSsKHcSfDjYQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fdigitalcommons.law.msu.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1014%26context%3Dilr&usg=AOvVaw2q8AjwPLm0hudSVyKkFC7u>

Hidayat, Muhammad Nizar. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Tiongkok. *Jurnal Interdependence*, 1(3), 165 – 179. Diakses dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7qLrl3qAhUSOisKHVYQBcgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.unmul.ac.id%2Findex.php%2FJHI%2Farticle%2Fdownload%2F1327%2F1012&usg=AOvVaw0y6R\\_hRhZ-cZuYmOikiTUW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7qLrl3qAhUSOisKHVYQBcgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.unmul.ac.id%2Findex.php%2FJHI%2Farticle%2Fdownload%2F1327%2F1012&usg=AOvVaw0y6R_hRhZ-cZuYmOikiTUW)

Karisma, Gita. (2017). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara Tiongkok Terhadap Keutuhan Wilayah. *Jurnal Sosiologi*. 19(1). 41-52. Diakses dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOI9fW-9\\_qAhVm93MBHciiBpMQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Frepositor](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOI9fW-9_qAhVm93MBHciiBpMQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Frepositor)

y.lppm.unila.ac.id%2F6158%2F1%2F364-712-1-PB.pdf&usg=AOvVaw101yFBW9pn3tyulZ3fxHsS

Maziyah, Roihanatul. (2020). "Seafood not Slavefood": Advokasi Aktivismen Transnasional untuk Mengakhiri Praktik Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand. *Journal of International Relations*. 6(1). 92-107. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/26261/23249>

Olson, Fanny. (2015). *Uyghur Identity Contestation and Construction of Identity in a Conflict Setting*. [Diakses pada: 4 Desember 2020, melalui [https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40575/1/gupea\\_2077\\_40575\\_1.pdf](https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40575/1/gupea_2077_40575_1.pdf) ]

Parameswari, P. (2016). Gerakan Transnasional dan Kebijakan : Strategi Advokasi *Greenpeace Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok. *Dauliyah Journal of Islamic and International Studies*. 1(2). 209-228. Diakses dari 601-1054-1-SM.pdf

Ula, Syarifatul. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus *Human Rights Watch* dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*. 3(3). 19-28. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/16758/16094>

Waisbich, Laura Trajber. (2014). *Transnationalization as Mediation: Uyghur's rights-based mobilization outside China*. [Diakses pada: 2 Desember 2020, melalui <http://epress.utsc.utoronto.ca/cord/wp-content/uploads/sites/82/2014/05/Chapter-12-Waisbich.pdf> ]

## LAPORAN RESMI

Amnesty International. (2009). Uyghur Ethnic Identity Under Threat In Tiongkok. diakses melalui <http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/010/2009/en> pada tanggal 06 Juni 2019

HRW. (2018). "Tiongkok : Penggerebekan Besar – Besaran Di Wilayah Muslim". diakses melalui [www.hrw.org/id/news/2018/09/09/322309](http://www.hrw.org/id/news/2018/09/09/322309) pada tanggal 01 Juli 2019

WUC. (2016). "Forced Labour in East Turkestan: State-Sanctioned Hashar System". diakses melalui [https://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/2016/11/Forced\\_Labour\\_in\\_East\\_Turkestan\\_WUC.pdf](https://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/2016/11/Forced_Labour_in_East_Turkestan_WUC.pdf) pada tanggal 25 November 2020

## BERITA

Amnesty International. (2019). *China 2019*. [Diakses pada: 6 Desember 2020, melalui <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/> ]

- BBC. (2018). "Muslim Uyghur di Tiongkok : Persekusi melalui kamp "pendidikan kembali"". Diakses melalui [www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-45835871](http://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-45835871) pada tanggal 01 Juli 2019
- BBC. (2018). "PBB klaim satu juta etnis minoritas muslim Uyghur ditahan di kamp – kamp politik Tiongkok". Diakses melalui [www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-45154379](http://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-45154379) pada 01 Juli 2019
- BBC. (2020). *Muslim Uighur: China sebut jutaan warga Xinjiang ikut program "pendidikan vokasi", AS samakan dengan kamp konsentrasi*. [Diakses pada: 2 Desember 2020, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54161896> ]
- Cao, Yaxue. (2016). *Making the Case for Nominating Ilham Tohti for the Sakharov Prize – My Remarks at the European Parliament*. [Diakses pada: 6 Desember 2020, melalui <https://chinachange.org/2016/05/31/making-the-case-for-nominating-ilham-tohti-for-the-sakharov-prize-my-remarks-at-the-european-parliament/> ]
- Chung, Chen –peng. (2002). "Tiongkok's War on Terror: September 11 and Uyghur Separatism". Diakses melalui [http://www.cfr.org/publication/4765/Tiongkok\\_s\\_war\\_on\\_terror.html](http://www.cfr.org/publication/4765/Tiongkok_s_war_on_terror.html) pada 06 Juni 2019
- CNN Indonesia. (2018). "Kemlu Panggil Dubes Tiongkok Terkait Muslim Uyghur di Xinjiang". Diakses melalui <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181220172227-106-355273/kemlu-panggil-dubes-tiongkok-terkait-muslim-uyghur-di-xinjiang> pada 08 Juni 2019
- European Parliament. (2019). *JOINT MOTION FOR A RESOLUTION*. [Diakses pada: 7 Desember 2020, melalui [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0246\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0246_EN.html) ]
- Human Rights Watch. (2020). *China's Influence on the Global Human Rights System*. [Diakses pada: 5 Desember 2020, melalui <https://www.hrw.org/news/2020/09/14/chinas-influence-global-human-rights-system> ]
- Human Rights Watch. (2020). *China : Big Data Program Targets Xinjiang's Muslims*. [Diakses pada: 16 Desember 2020, melalui <https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims> ]
- Maizland, Lindsay. (2020). *China's Repression of Uighurs in Xinjiang*. [Diakses pada: 5 Desember 2020, melalui <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uighurs-xinjiang> ]
- Radio Free Asia. (2019). *European Parliament Passes Resolution*

- Condemning China on Treatment of Uyghurs in Xinjiang*. [Diakses pada: 4 Desember 2020, melalui <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/resolution-12192019145547.html> ]
- Radio Free Asia. (2020). *EU Seen Turning Tough Rhetoric Into Action on Abuses Against Muslim Uyghurs in China*. [Diakses pada: 6 Desember 2020, melalui <https://www.rfa.org/english/news/uyghur/eu-seen-turning-tough-rhetoric-into-action-02212020171252.html> ]
- Sudworth, John. (2018). "Investigasi BBC : Tiongkok dirikan kamp – kamp rahasia untuk "mendidik" umat Muslim Uyghur di Xinjiang". Diakses melalui [www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-45962686](http://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-45962686) pada 01 Juli 2019
- The Japan Times. (2018). *U.N. says it has credible reports China is holding 1 million Uighurs in secret camps*. [Diakses pada: 7 Desember 2020, melalui <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/11/asia-pacific/u-n-says-credible-reports-china-holding-1-million-uighurs-secret-camps/> ]
- The Reuters. (2018). *U.N. calls on China to free Uighurs from alleged re-education camps*. [Diakses pada: 7 Desember 2020, melalui <https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un-idUSKCN1LF1D6> ]
- Turkestan Times. (2017). *Press Release – For immediate release*. [Diakses pada: 5 Desember 2020, melalui <https://turkistantimes.com/m/news-2172.html> ]
- UNPO. (2009). *2009 Hearing: World Uyghur Congress and UNPO at EU Parliament*. [Diakses pada: 7 Desember 2020, melalui <https://unpo.org/article/11433> ]
- UNPO. (2017). *East Turkestan: World Uyghur Congress Speech at UN Forum on Minority Issues Disrupted By China*. [Diakses pada: 7 Desember 2020, melalui <https://unpo.org/article/19769> ]
- UNPO. (2018). *2,000 March for Freedom of the Uyghurs in Large-Scale Demonstration Organised by UNPO and WUC*. [Diakses pada: 4 Desember 2020, melalui <https://unpo.org/article/20774> ]
- VOA News. (2019). *UN Human Rights Council Divided Over China's Xinjiang Policies*. [Diakses pada: 5 Desember 2020, melalui <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/un-human-rights-council-divided-over-chinas-xinjiang-policies> ]
- World Uyghur Congress. (2017). *WORLD UYGHUR CONGRESS MAKES INTERVENTION AT 10TH UN FORUM ON MINORITY ISSUES*. [Diakses pada: 6 Desember 2020,

melalui  
<https://www.uyghurcongress.org/en/world-uyghur-congress-makes-intervention-at-10th-un-forum-on-minority-issues/> ]

Xin, Liu dan Fan Lingzhi. (2020). *World Uyghur Congress a US-backed network seeking the 'fall of China': US news website*. [Diakses pada: 6 Desember 2020, melalui <https://www.globaltimes.cn/content/182641.shtml> ]

#### **WEBSITE RESMI**

*World Uyghur Congress*. (n.d).  
<https://www.uyghurcongress.org>